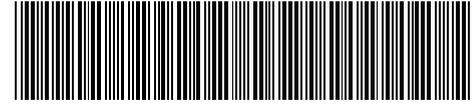




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693157/2025**



DS:9532-1023-0780-2823

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (693157) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 291.047.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 291.047.000
Rp. 291.047.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	291.047.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 291.047.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693157/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9532-1023-0780-2823

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693157) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen				291.047.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				291.047.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan		257.517.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	4.00	Rekomendasi Kebijakan		257.517.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	orang		33.530.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	100.00	orang		33.530.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693157/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9532-1023-0780-2823

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693157) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

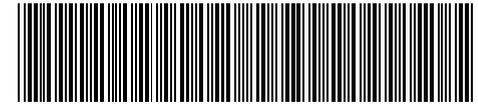
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693157	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	291.047	-	-	-	291.047		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	291.047	-	-	-	291.047		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	291.047	-	-	-	291.047		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	257.517	-	-	-	257.517	33 . 51	
01	RM	-	257.517	-	-	-	257.517	065@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	33.530	-	-	-	33.530	33 . 51	
01	RM	-	33.530	-	-	-	33.530	065@	
JUMLAH		-	291.047	-	-	-	291.047		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693157/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9532-1023-0780-2823

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693157) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693157	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.045	24.505	12.700	30.800	25.197	54.960	32.810	17.400	36.410	43.270	6.500	1.450	291.047
		BELANJA BARANG	5.045	24.505	12.700	30.800	25.197	54.960	32.810	17.400	36.410	43.270	6.500	1.450	291.047
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	5.045	24.505	12.700	30.800	25.197	54.960	32.810	17.400	36.410	43.270	6.500	1.450	291.047
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.045	24.505	12.700	30.800	25.197	54.960	32.810	17.400	36.410	43.270	6.500	1.450	291.047

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693157/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9532-1023-0780-2823

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693157] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

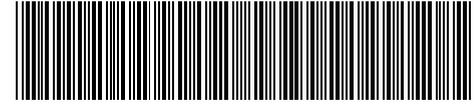
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693157	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 121.675		
	52 Belanja Barang Rp. 121.675		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.800		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.875		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.650		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.350		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693157/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9532-1023-0780-2823

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693157] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001